

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDP Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Senin, 21 September 2015
Waktu	: Pukul 11.00 s.d. 12.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Sekretaris Jenderal MPR RI dalam pembahasan RKA KL Tahun 2016, menyampaikan usulan program-program, diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015, MPR RI memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 953.302.827.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), alokasi anggaran tersebut terbagi atas 3 (tiga) program, yaitu :
 1. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 848.873.513.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai 6 (enam) Kegiatan, yaitu :

- A. Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR sebesar Rp. 42.980.365.000,- Anggaran ini antara lain dialokasikan untuk membiayai: Penerimaan Delegasi/Tamu MPR dari Luar Negeri; Penerimaan Tamu/ Delegasi Dalam Negeri Ketua MPR; Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Wakil Ketua MPR; Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka Penguatan Konstitusi dan Hari Pancasila; Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah, ke Daerah Perbatasan, ke Negara Sahabat dan Dalam Rangka Penguatan Nasionalisme; Silaturahmi Kebangsaan; Koordinasi, Konsultasi, dan Konsinyering Pimpinan MPR dengan Badan-Badan dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR Lainnya.
- B. Pelaksanaan Kegiatan Publikasi/Peliputan sebesar Rp. 89.139.590.000,- Anggaran ini antara lain dialokasikan untuk membiayai: Peliputan Kegiatan MPR, Publikasi Kegiatan MPR, Diskusi dengan Wartawan, Program Televisi, Dokumentasi Media visual, Publikasi Gerakan Ini Baru Indonesia dan Pagelaran Seni Budaya Nusantara.
- C. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR sebesar Rp. 443.602.529.000,- Anggaran ini antara lain dialokasikan untuk membiayai:
- 1) Sosialisasi oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan.
 - 2) Sosialisasi Undangan/Permintaan Instansi/Ormas/Orpol.
 - 3) Sosialisasi PGRI di Kabupaten/Kota;
 - 4) Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- D. Pengkajian Kemajelisian sebesar Rp. 224.843.663.000,- Anggaran ini antara lain dialokasikan untuk membiayai:
- 1) Focus Group Discussion (FGD);
Kegiatan ini dilakukan MPR RI sebagai salah satu upaya strategis dalam menyerap dan melaksanakan pengkajian tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika..
 - 2) Seminar Nasional dan Daerah;
Metode pelaksanaan seminar nasional terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - a. Seminar Nasional Kebangsaan
 - b. Seminar Fraksi/Kelompok di Jakarta
 - c. Seminar Fraksi/Kelompok di Daerah
 - 3) Kajian Akademik;
 - 4) Kemitraan dengan Universitas atau Lembaga Strategis;
 - 5) Penyerapan Aspirasi Masyarakat;
 - 6) Rapat Badan Pengkajian;
Dalam upaya penguatan sistem ketatanegaraan dirasakan perlunya kajian yang melibatkan berbagai unsur diantaranya para pakar, politikus, akademisi dan lain sebagainya.
 - 7) Rapat dan Kegiatan Lembaga Pengkajian.
- E. Penganggaran MPR sebesar Rp.23.724.707.000,- Anggaran ini antara lain dialokasikan untuk membiayai: Kegiatan koordinasi, konsultasi dan konsinyering Badan Penganggaran MPR,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran badan/lembaga, survey efektifitas pelaksanaan sosialisasi empat pilar.

- F. Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR sebesar Rp.24.582.659.000,- Anggaran ini dialokasikan untuk membayar gaji dan operasional Pimpinan MPR serta honorarium tenaga ahli Pimpinan MPR dan Fraksi/Kelompok.
 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp.68.345.366.000,- Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai kegiatan teknis dan administrasi bagi Sekretariat Jenderal MPR, seperti:
 - a. Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp.9.545.627.000,-
 - b. Penyelenggaraan Kehumasan sebesar Rp.1.915.966.000,-
 - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal sebesar Rp.24.659.000.000,-
 - d. Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp.28.153.920.000,-
 - e. Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan sebesar Rp.3.861.843.000,-
 - f. Dukungan Pengkajian Kemajelis sebesar Rp.209.010.000,-
 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp.36.083.948.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan, pengadaan dan pengelolaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai bagi Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan yang optimal kepada Majelis.
- Dari pagu anggaran yang diperoleh pada tahun 2016, masih ada selisih kekurangan dari anggaran yang diajukan sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.619.682.265.260,- dan tentunya belum dapat membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai. MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp.666.379.438.260,- yang akan dialokasikan untuk :
1. Tambahan pada Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 623.207.653.561,- Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai Tugas Pimpinan MPR dan Badan-Badan yang belum terakomodir di dalam pagu anggaran.
 2. Tambahan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp.19.965.098.485,- Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MPR.
 3. Tambahan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp. 23.206.686.214,- Anggaran ini dialokasikan untuk pengadaan kendaraan bermotor, renovasi ruangan untuk fraksi-fraksi di Gedung Nusantara IV dan peralatan serta fasilitas perkantoran Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan yang optimal kepada Majelis.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI dalam mengajukan usulan RKA KL Tahun 2015, diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut :

- Melalui surat Menteri Keuangan RI Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 menetapkan bahwa Pagu Anggaran DPD RI Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.069.594.539.000,- (satu triliun enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi sebesar Rp. 452.000.000.000,-
 - B. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD sebesar Rp. 517.294.539.000,-
 - C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD sebesar Rp. 100.300.000.000,-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH
A	Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi	452.000.000.000,-
1	Dukungan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD RI	70.425.000.000,-
	a. Pelaksanaan dan Pemasarakatan Keputusan DPD RI	58.338.785.000,-
	b. Hasil Konsultasi DPD RI Dengan Lembaga Negara Lainnya/Pemda/ Praktisi/LSM/Mahasiswa, Pakar/Ahli dan Kelompok Masyarakat/ Konstituen dan <i>Stakeholders</i> Di Daerah	12.086.215.000,-
2	Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD RI, dan Pengembangan Kerjasama DPD RI	103.875.000.000,-
	a. Kerjasama Luar Negeri/Partisipasi Pada Sidang Parlemen Internasional	10.410.000.000,-
	b. Preparasi Rancangan Kebijakan Mengenai Pansus DPD RI, Sistem Demokrasi Dan Ketatanegaraan, Uji Materi Atas RUU tertentu, <i>Law Center</i> , dan Materi Lainnya	16.868.595.000,-
	c. Pelaksanaan Tugas Komite DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah Serta Antardaerah, Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah, Pemukiman dan Kependudukan, Pertanahan dan Tata Ruang, dan Politik, Hukum dan HAM	26.100.000.000,-
	d. Pelaksanaan Tugas Komite DPD RI Bidang Pendidikan; Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan; dan	26.100.000.000,-

	Ketenagakerjaan	
	e. Pelaksanaan Tugas Panitia Perancang Undang-Undang	15.960.000.000,-
	f. Layanan Perkantoran	8.436.405.000,-
3	Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Fungsi Badan Kehormatan	277.700.000.000
	a. Rapat-Rapat Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	191.600.000.000,-
	b. Preparasi Rancangan Kebijakan Mengenai Badan	21.300.000.000,-
	c. Pelaksanaan Tugas Komite DPD RI Bidang Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Ekonomi, Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum	26.100.000.000,-
	d. Pelaksanaan Tugas Komite DPD RI Bidang APBN, Pajak dan Pungutan Lain, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pertimbangan Hapsem BPK; Pemilihan Anggota BPK, Lembaga Keuangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	26.100.000.000,-
	e. Layanan Perkantoran	12.600.000.000,-
B	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI	517.294.539.000,-
1	Penatausahaan, Organisasi, Keanggotaan, SDM, dan Pengawasan Internal	25.927.000.000,-
	a. Pengadministrasi Keanggotaan dan Kepegawaian	3.095.792.000,-
	b. Dokumen Sistem dan Prosedur Teknis	10.811.860.000,-
	c. Jumlah SDM Yang Ikut Serta Pendidikan dan Pelatihan	6.619.348.000,-
	d. Layanan Perkantoran	5.400.000.000,-
2	Administrasi Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan DPD RI	361.514.539.000,-
	a. Dokumen Penyusunan Program dan Anggaran DPD RI dan Setjen DPD RI	3.006.161.000,-
	b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Verifikasi, dan Pelaporan Penggunaan Anggaran DPD RI dan Setjen DPD RI Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	5.491.680.000,-

	c. Layanan Perkantoran	353.016.698.000,-
3	Pengolahan Data Dan Teknologi Informasi	29.400.000.000,-
	a. Kehumasan/Pemberitaan/Publikasi	18.441.330.000,-
	b. Pengumpulan Dan Pengolahan Data	4.625.950.000,-
	c. Pengembangan Sistem Informasi DPD RI	6.332.720.000,-
C	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI	100.300.000.000,-
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana Dan Prasarana	100.300.000.000,-
	a. Layanan Perkantoran	16.700.100.000,-
	b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	5.366.820.000,-
	c. Kantor Baru DPD RI Di Ibukota Provinsi	78.233.080.000,-

➤ Pagu Anggaran DPD RI Tahun 2016 tersebut hanya dapat mendukung kegiatan DPD RI sebagai berikut:

1. Gaji dan tunjangan anggota DPD dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI di ibukota negara serta pegawai Setjen DPD RI di 4 (empat) provinsi;
2. Penyusunan produk legislasi dan hasil pengawasan DPD RI atas Undang-Undang Tertentu yaitu ;

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
a.	Penyusunan RUU Usul dari DPD RI	10 RUU
b.	Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI atas RUU tertentu dan Penyusunan Pertimbangan DPD RI atas RUU	14 RUU
c.	Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI	22 UU/Materi

3. Kegiatan Operasional Kantor DPD RI di Ibu Kota Negara (ATK, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Pengadaan Peralatan kantor, dll);
4. Penyelenggaraan dukungan operasional kerja Sekretariat Jenderal DPD (Penatausahaan organisasi dan SDM, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan akuntabilitas lembaga, dll);
5. Pembangunan Kantor (Permanen) DPD RI di 3 (tiga) provinsi yang diprioritaskan bagi provinsi yang telah selesai pekerjaan konsultasi perencanaan gedung (desain perencanaan), yaitu: Jambi, Sulawesi Utara, dan NTB.

➤ Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pagu Anggaran DPD RI Tahun 2016 belum dapat memenuhi program/kegiatan DPD RI Tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPD RI Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015 – 2019, sehingga DPD RI mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 1.607.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tujuh miliar rupiah) untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN PAGU INDIKATIF	PAGU ANGGARAN	YANG BELUM TERALOKASIKAN
1.	Penyusunan RUU Usul DPD	11 RUU	10 RUU	1 Materi
2.	Pandangan/Pendapat/ Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu	23 RUU	14 RUU	9 Materi
3.	Hasil Pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU tertentu	32 UU/Materi	22 UU/Materi	10 UU/Materi

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945. Hal penting dalam putusan MK tersebut adalah sebagai berikut:
 3. Kegiatan Pencarian Data/Fakta atas Permasalahan Daerah dan Pengaduan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang sifatnya mendesak dan harus segera ditindaklanjuti;
 4. Sosialisasi dan publikasi DPD RI sebagai bentuk akuntabilitas kinerja DPD RI tahun 2014-2019;
 5. Pembentukan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, meliputi:
 - a. Operasional Kantor (sementara) DPD RI di ibukota provinsi yaitu Gaji dan Tunjangan Pegawai; Biaya Operasional Kantor; dan Pembinaan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, meliputi: *Detasering* Pegawai, Pendidikan Teknis dan Pelatihan Keterampilan bagi Staf di Kantor Sekretariat DPD RI di Daerah, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dan pengkajian/ pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah.
 - b. Pembangunan gedung Kantor (Permanen) DPD RI di 1 (satu) provinsi.
3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut :
 - Meminta kepada MPR RI untuk melakukan sosialisasi dan publikasi pada media lokal dan nasional terkait hal-hal yang telah dilakukan.
 - Apa tujuan akhir diadakannya sosialisasi dengan metode perlombaan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi empat pilar.
 - MPR RI harus mendengarkan komplain dari banyak pihak tentang adanya pembatasan waktu untuk melakukan sosialisasi.
 - Meminta penjelasan MPR RI terkait pengajuan usulan tambahan anggaran MPR RI TA 2016 sebesar Rp.666.379.438.260,- yang akan dialokasikan untuk berbagai program seperti penerimaan delegasi/tamu MPR RI.
 - Meminta penjelasan MPR RI terkait Survey efektifitas pelaksanaan sosialisasi empat pilar yang membutuhkan dana sebesar Rp.1,058 M; Kerjasama antar majelis dengan negara lain sebesar Rp.3,3 M; dan

- pengadaan kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang membutuhkan dana sebesar Rp.4 M.
- Apakah manfaat dari pelaksanaan kegiatan publikasi/peliputan kegiatan MPR.
 - Terkait dengan program MPR RI yaitu menyusun buku/booklet/jurnal dirasa kurang tepat sehingga patut dikaji ulang.
 - Apakah ada perbedaan antara buku hasil kajian dengan buku kegiatan Badan Pengkajian.
 - Apakah esensi dari pengadaan FGD untuk mengukur efektifitas pelaksanaan sosialisasi empat pilar .
 - Adanya kemiripan program public survey implementasi Pancasila dan Konstitusi, meminta kepada Sekjen MPR agar alokasi dana yang tidak perlu dapat dikaji ulang.
 - Implementasi dari program yang diajukan cenderung tidak menghasilkan prestasi dan justru menjadi wanprestasi, bagaimana agar output dari pelaksanaan berbagai program kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai program yang dibuat hanya sebagai formalitas dan hasilnya tidak sebanding dengan anggaran yang diajukan.
 - Dalam keadaan Negara yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sebaiknya usulan MPR RI penambahan anggaran tahun 2016 perlu dikaji ulang. Jangan sampai dengan menghabiskan anggaran negara tanpa melihat efektifitas/manfaat dari pelaksanaan program.
 - Terkait usulan pembangunan gedung DPD RI di Ibukota Negara dan rencana renovasi gedung DPD RI dirasa tidak tepat, hendaknya mempertimbangkan situasi kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
 - Dalam program pengolahan data dan teknologi informasi, seperti apakah penyelenggaraan dukungan teknis dan keahlian DPD di daerah pemilihan.
 - Apabila Pimpinan DPD menugaskan Sekjen DPD untuk mengajukan rencana kerja anggaran, apakah rencana kerja ini sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPD.
 - Apakah usulan penambahan anggaran tahun 2016 yang disampaikan Sekjen DPD untuk pembangunan gedung DPD sudah disampaikan pada Rapat Sidang Paripurna DPD.
4. Sekjen MPR RI menyampaikan tambahan penjelasan bahwa MPR dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan pendapat dari Badan Anggaran, berpikir logis untuk menghitung hari dalam melaksanakan program kegiatan MPR. Terkait pengadaan kendaraan dinas yaitu pengadaan 2 bus eksklusif
 5. Sekjen DPD RI menyampaikan tambahan penjelasan bahwa terkait usulan penambahan anggaran untuk Pembangunan gedung DPD sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Dengar Pedapat Komisi III dengan Sekjen MPR RI, dan Sekjen DPD RI, mengambil keputusan/kesimpulan, sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI meminta kepada MPR RI untuk merevisi kembali Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan sebesar Rp 666.379.438.260,- yang disampaikan, guna mendapat tanggapan dari Fraksi-fraksi dalam rapat pleno Komisi III yang selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI.
2. Komisi III DPR RI meminta kepada DPD RI untuk merevisi kembali Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan sebesar Rp 1.607.000.000.000,- (untuk pembangunan gedung di ibukota negara), yang disampaikan, guna mendapat tanggapan dari Fraksi-fraksi dalam rapat pleno Komisi III yang selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB

KOMISI III DPR RI